

Pengaruh Penerapan *Accrual Basis*, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa

Imelda¹ Hilmi²

Mursidah³ Rayyan Firdaus⁴

imelda.190420132@mhs.unimal.ac.id¹, Hilmi@unimal.ac.id², mursida@unimal.ac.id³,
rayyan@unimal.ac.id⁴

Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *Accrual Basis*, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Langsa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 78 responden yang terdiri dari Kepala Sub Bagian keuangan, Bendahara dan Staf Keuangan di OPD Kota Langsa, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan *Accrual Basis* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa, (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa. (3) sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Langsa.

Kata kunci : Penerapan *Accrual Basic*, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

This research aims to determine the influence of the implementation of the *Accrual Basis*, human resource competency and the government's internal control system on the quality of Langsa City government financial reports. This research was conducted at the Regional Apparatus Organization (OPD) in Langsa City. The data used in this research is primary data obtained by distributing questionnaires to 78 respondents consisting of the Head of the Finance Sub-Division, Treasurer and Financial Staff at the Langsa City OPD. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The research results show that (1) the implementation of the *Accrual Basis* has a positive and significant effect on the quality of the Langsa City government's financial reports, (2) Human Resource Competency has a positive and significant effect on the quality of the Langsa City government's financial reports. (3) the government's internal control system has a positive and significant effect on the quality of Langsa city government's financial reports.

Keywords : Implementation of the *Accrual Basic*, Human Resources Competency, Government Internal Control System, Quality of Regional Government Financial Reports

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan dengan kegunaan yang berbeda-beda. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK. Upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 22/PMk.05/2022 Tahun 2022 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), Salah satu tugas Badan Pengawasan Keuangan (BPK) ialah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam bentuk opinin audit. Terdapat empat opini audit yang diberikan pemeriksa, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak memberi Pendapat (TMP). (Sa'adah and Nasrullah 2021). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Opini yang diberikan terhadap LKPD Kota Langsa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Daftar Opini LKPD Kota Langsa

Nomor	Tahun	Opini Audit
1	2009	WTP
2	2010	WDP
3	2011	WDP
4	2012	WDP
5	2013	WTP
6	2014	WTP
7	2015	WTP
8	2016	WTP
9	2017	WTP
10	2018	WTP
11	2019	WTP
12	2020	WTP
13	2021	WTP

Sumber: BPK RI, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Langsa tahun 2009 sampai dengan 2021 mengalami kondisi fluktuasi untuk opini audit yang didapatkan. Pada tahun 2009 mendapatkan opini Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi pada tahun 2010 sampai dengan 2012 terjadi penurunan menjadi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2013 sampai dengan 2021 terjadi peningkatan dan konsisten dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (BPK, 2022).

Fenomena kualitas laporan keuangan di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam suatu instansi pemerintahan daerah khususnya masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan yang ditemukan ketika BPK melaksanakan audit. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bisa terjadi dalam bentuk penyajian data yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku umum di Indonesia yang mengindikasikan bahwa terjadinya kelemahan dalam sistem pengendalian pelaporan keuangan sehingga mendapat opini yang kurang memuaskan dari BPK (Purba et al., 2019).

Pada tahun 2020, terjadi sebuah fenomena dimana Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa tahun anggaran 2021. Pemeriksaan tersebut dilakukan sejak 6 Maret hingga 4 April 2022 lalu. Hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah persoalan di Pemko Langsa, salah satunya Pemko Langsa salah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal mencapai Rp 2 miliar (Asrul, 2022).

Salah anggarakan belanja barang tersebut terdapat pada enam OPD sebesar Rp 2 miliar. Untuk diketahui pada tahun anggaran 2021, Pemko Langsa menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut. Belanja Barang dan Jasa Anggaran sebesar Rp 250,6 miliar dan terealisasi Rp 211,3 miliar atau 84,31 persen, kemudian Belanja Modal Rp 190,6 miliar terealisasi Rp 184,3 miliar atau 96,71 persen. Hasil review atas dokumen penganggaran dan bukti-bukti transaksi realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dilalukan tim BPK Perwakilan Aceh menunjukkan terdapat kesalahan penganggaran atas belanja sebesar Rp 2 miliar (Asrul, 2022).

Berdasarkan dari fenomena diatas dimana temuan salah saji dalam laporan realisasi anggaran yaitu salah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal mencapai Rp 2 miliar. Salah anggarakan belanja barang tersebut terdapat pada enam OPD sebesar Rp 2 miliar. Berdasarkan hasil review BPK tersebut menyebabkan kurang baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah kota langsa. Kesenjangan antara kenyataan dan harapan terjadi ketika fakta menunjukkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa kurang baik. Padahal seharusnya dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik maka kualitas Laporan Keuangan akan baik. Ketidaksiesuaian tersebut menjadi masalah yang penting untuk diteliti untuk melihat sejauh mana penerapan accrual basis, kompetensi sumber daya manusia dan Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, sehingga diperoleh informasi mengenai penyebab buruknya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan sehingga ada beberapa Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dibahas pada penelitian ini, diantaranya Penerapan Accrual Basis, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Pemerintah. Berdasarkan referensi penelitian terdahulu serta fenomena yang dijelaskan didalam latar

belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Accrual Basis, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*), yaitu penerima amanah (*agent*) dengan pemberi amanah (*principal*). Dalam hal ini pemberi amanah (*principal*) memberikan wewenang kepada penerima amanah (*agent*) untuk membuat keputusan terbaik, disini *agent* melakukan jasa untuk dan atas nama *principal*. Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Mecklin tahun 1976 yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Terjadinya masalah pada *agent* dan *principal* karena adanya perbedaan kepentingan (Brigham & Houston, 2018:101)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut PP Nomor No 12 Tahun 2019, “Laporan keuangan pemerintah merupakan alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah”. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode tertentu. Menurut Munawir (2016:31), “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus.

Penerapan Accrual Basic

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. Menurut Sujarweni (2015:85), “Accrual basis adalah metode pencatatan akuntansi, dimana konsep pengakuan sesungguhnya, dimana pada saat terjadinya transaksi ekonomi dicatat, diakui, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi tanpa harus memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan”.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Irmayani (2020:1). Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu

secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan(goal). Menurut Simamora, et al (2016:84), Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah proses pendayagunaan, pengembangan, dan penilaian untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal dalam mencapai tujuan- tujuannya. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dibidang tertentu seperti komunikasi verbal, kemampuan persentasi, pengetahuan teknis, kemampuan mengelola tekanan pekerjaan, dan kemampuan membuat dan mengambil keputusan. Peningkatan kerja dapat memungkinkan melakukan banyak pekerjaan maka pengalaman kerja seseorang akan semakin kaya dan luas. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat pula dia menyelesaikan pekerjaan tersebut (Hilmi dan Birra, 2022).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Mulyadi (2016:129), Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Sujarweni (2015:70), pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi, pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal Pemerintah adalah keseluruhan proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai dalam rangka menciptakan keyakinan penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan efisiensi dan efektivitas, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. Pemerintah harus mampu memberikan laporan keuangan dengan informasi yang berkualitas agar pengguna dapat mudah mengerti termasuk masyarakat yang ingin tahu laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, harus adanya pengendalian internal yang efektif dan pemerintah yang dapat mengendalikan tekanan yang dapat mengganggu stabilitas penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat mengawasi dan mengurangi resiko dalam kecurangan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa (Sinamo dan Hilmi, et al. 2022).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hastutik dan Riduwan, (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Akuntansi Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Study pada SKPAD Kota Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al., (2019) dengan judul “Pengaruh Akuntansi Berbasis Akruar dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Helle et al., (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Variabel motivasi kerja berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2022) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tanggerang)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah dan Nasrullah (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Penerapan Accrual Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hubungan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada teori agensi juga dapat dilihat dari aturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah yang bertindak sebagai agent yang diberi kewenangan oleh principal diharapkan dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dengan mematuhi aturan atau prinsip yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapat opini WTP dari BPK. Semakin mematuhi aturan SAP dalam pembuatan LKPD maka laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas (Rahayu, 2020).

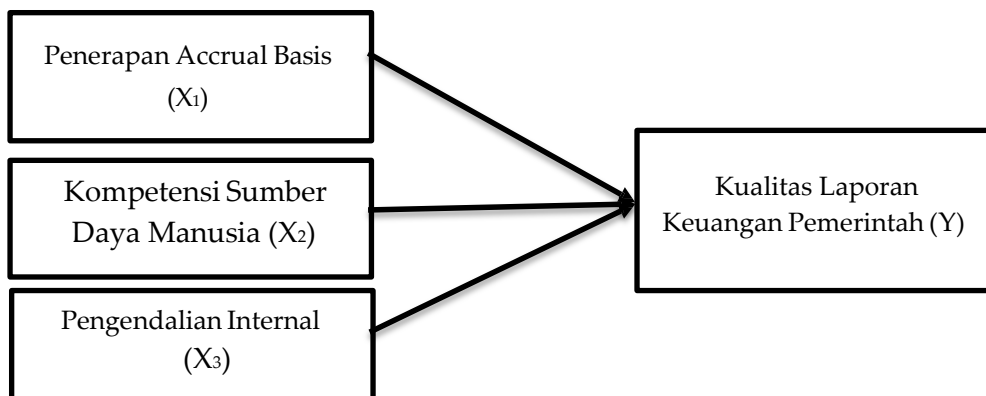
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam teori agensi dijelaskan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan. Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan (Elfauzi dan Sudarno, 2019).

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka pemerintahan daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Apabila mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Maka hal ini mampu dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan dikarenakan pengendalian intern pada setiap OPD baik sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi berkualitas (Sa'adah dan Nasrullah, 2021).

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Hipotesis

- H1 : Penerapan Accrual Basis berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- H2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

METODE

Objek Dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Langsa yang berjumlah 26. Lokasi penelitian terletak di Kota Langsa yang merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Aceh.

Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai yang bertugas dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Langsa dari 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Responden dalam penelitian ini meliputi Kasubbag (Kepala Sub Bagian) Keuangan Organisasi Perangkat Daerah, Bendahara Organisasi Perangkat Daerah, Staff Keuangan Organisasi Perangkat Daerah dikarenakan responden tersebut dianggap mengerti dan paham mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Jumlah responden disesuaikan dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 Organisasi perangkat daerah. Hal ini mengartikan bahwa total sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 Orang responden.

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sugiyono (2019 : 7), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan penelitian pada populasi atau sampel yang diperoleh dengan teknik sampling jenuh dan selanjutnya data akan diolah secara statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung dari responden dengan sumber asli melalui kuisioner.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dengan masalah yang dibahas, baik melalui sumber primer maupun sekunder. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan cara tinjauan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan menyebarkan angket kuisioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Responden akan menilai setiap jawaban dari pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin.

Defenisi Operasional Variabel

Variabel Terikat (Dependent Variable)

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. (Pelaporan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2022)

Variabel Bebas (Independent Variable)

Penerapan Accrual Basis adalah metode akuntansi untuk mencatat peristiwa dan transaksi saat terjadi terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. (Permendagri No. 64 Tahun 2001)

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Pattiasina and Noch 2019)

Pengendalian internal pemerintah adalah keseluruhan proses tindakan proses dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai dalam rangka menciptakan keyakinan penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan efisiensi dan efektivitas, kendala pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008).

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019:147), yang dimaksud statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat adanya kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019), instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka data dapat dikatakan valid.

Uji Reabilitas

Menurut Sugiyono (2019) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun benar benar merupakan hasil yang baik, reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya apabila alat ukur yang digunakan stabil, dapat diandalkan, dan dapat digunakan dalam peramalan. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach Alpha.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali 2016). Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan grafik histogram dan grafik P-Plot, yakni jika pola penyebaran garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap/sama, maka disebut homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016:277), menyatakan bahwa analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana naik maupun turunnya variabel dependen. Bila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor memanipulasinya. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan, dinyatakan dalam model berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
A	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$,	=	Koefisien Regresi
X1	=	Penerapan Accrual Basis
X2	=	Kompetensi Sumber Daya Manusia
ε	=	Error Term

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:98) menyatakan bahwa uji statistika t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian signifikan t dapat dilakukan melalui pengamatan Signifikansi pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5 %). Analisis didasarkan pada nilai signifikansi 0,05 dimana ketentuannya adalah :

1. jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis teruji yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis teruji yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisiendeterminasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (Penerapan Accrual Basis, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Pemerintah) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	78	27	50	40,44	3,663
X2	78	49	78	61,96	6,018
X3	78	30	50	38,62	4,113
Y	78	27	40	32,60	2,457
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Data diolah peneliti, (2024)

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Simalungun sebanyak 78 orang. Secara deskriptif penerapan accrual basis sebagai variabel independen pertama memiliki nilai maksimum 50 dan nilai minimum 27, sementara untuk nilai mean variabel accrual basis adalah sebesar 40,44 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,663.

Kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen kedua memiliki nilai maksimum 78 dan nilai minimum 49, sementara untuk nilai mean variabel accrual basis adalah sebesar 61,96 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 6,018.

Sistem pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel independen ketiga memiliki nilai maksimum 50 dan nilai minimum 30, sementara untuk nilai mean variabel accrual basis adalah sebesar 38,62 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 4,113. Kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai variabel dependen memiliki nilai maksimum 40 dan nilai minimum 27, sementara untuk nilai mean variabel accrual basis adalah sebesar 32,60 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2,457.

Uji Validitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	Nilai Signifikan	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,574	0,000	0,185	Valid
X1.2	0,562	0,000	0,185	Valid
X1.3	0,512	0,000	0,185	Valid
X1.4	0,391	0,000	0,185	Valid
X1.5	0,799	0,000	0,185	Valid
X1.6	0,734	0,000	0,185	Valid
X1.7	0,447	0,000	0,185	Valid
X1.8	0,412	0,000	0,185	Valid
X1.9	0,799	0,000	0,185	Valid
X1.10	0,734	0,000	0,185	Valid
X2.1	0,673	0,000	0,185	Valid
X2.2	0,749	0,000	0,185	Valid
X2.3	0,743	0,000	0,185	Valid
X2.4	0,756	0,000	0,185	Valid

X2.5	0,671	0,000	0,185	Valid
X2.6	0,458	0,000	0,185	Valid
X2.7	0,539	0,000	0,185	Valid
X2.8	0,485	0,000	0,185	Valid
X2.9	0,571	0,000	0,185	Valid
X2.10	0,485	0,000	0,185	Valid
X2.11	0,749	0,000	0,185	Valid
X2.12	0,288	0,011	0,185	Valid
X2.13	0,314	0,005	0,185	Valid
X2.14	0,673	0,000	0,185	Valid
X2.15	0,743	0,000	0,185	Valid
X2.16	0,794	0,000	0,185	Valid
X3.1	0,565	0,000	0,185	Valid
X3.2	0,553	0,000	0,185	Valid
X3.3	0,571	0,000	0,185	Valid
X3.4	0,651	0,000	0,185	Valid
X3.5	0,534	0,000	0,185	Valid
X3.6	0,385	0,001	0,185	Valid
X3.7	0,410	0,000	0,185	Valid
X3.8	0,283	0,012	0,185	Valid
X3.9	0,521	0,000	0,185	Valid
X3.10	1,000	0,000	0,185	Valid
Y.1	0,461	0,000	0,185	Valid
Y.2	0,454	0,000	0,185	Valid
Y.3	0,446	0,000	0,185	Valid
Y.4	0,337	0,003	0,185	Valid
Y.5	0,548	0,000	0,185	Valid
Y.6	0,482	0,000	0,185	Valid
Y.7	0,385	0,000	0,185	Valid
Y.8	0,391	0,000	0,185	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas semua indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari penerapan accrual basis, sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh data yang valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai nilai signifikansi dari semua variabel lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05, serta nilai R_{hitung} lebih besar dari R Tabel.

Uji Reabilitas

Tabel 4.3

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	cronbach's alpha	Keterangan
-----	----------	---------------------	------------

1	Penerapan Akruwal Basis	0,805	Reliabel
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,886	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,938	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0,701	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti tahun (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai cronbach's alpha semua variabel yang digunakan dalam penelitian lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4.4
Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov

N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	61,96
	Std. Deviation	6,018
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,074
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan pengujian one sample kolmogorov smirnov pada tabel 4.9 di atas, maka dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini memiliki nilai asymp lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

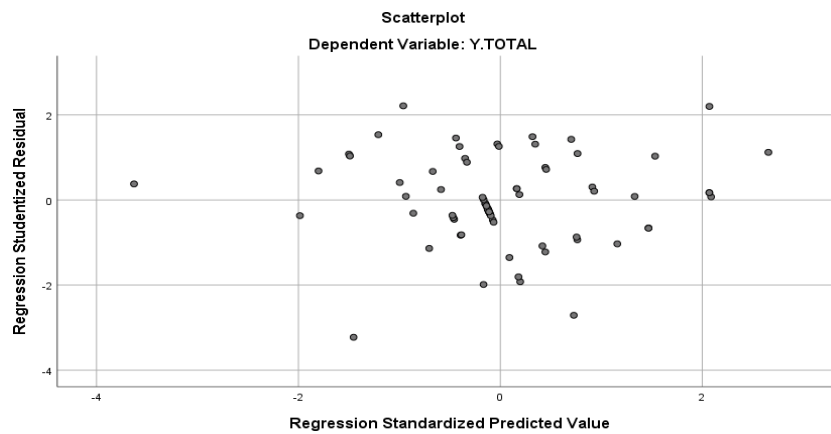
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Penerapan Akruwal Basis	0,455	2,198	Bebas Multikolinearitas
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,031	2,453	Bebas Multikolinearitas
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,037	7,196	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari penerapan accrual basis dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedasitas



Gambar 4.1

Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Berdasarkan hasil grafik scatterplot pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar pada gambar tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Accrual Basis, Kompetensi Sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,926 + 0,725 X1 + 0,070 X2 + 0,118 X3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai a sebesar 2,926 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum dipengaruhi oleh variabel lainnya atau dalam hal ini yaitu penerapan accrual basis (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan sistem pengendalian internal pemerintah (X3). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan. Berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan.
2. B1 (Nilai Koefisien regresi X1) sebesar 0,725, menunjukan bahwa variabel penerapan accrual basis mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten simalungun yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel penerapan accrual basis sebesar 1% maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa meningkat sebesar 72,5% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

3. B2 (Nilai Koefisien regresi X2) sebesar 0,070, menunjukan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 1% maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa meningkat sebesar 7,0% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.
4. B3 (Nilai Koefisien regresi X3) sebesar 0,118, menunjukan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota langsa yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1% maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun meningkat sebesar 11,8% dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std error of the Estimate
1	,983 ^a	,966	,964	,509

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.6 di atas, dapat dilihat nilai adjusted r-square adalah sebesar 0,966. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Langsa dipengaruhi oleh penerapan accrual basis, Kompetensi Sumber Daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 96,6%. Sedangkan sisanya sebesar 3,4% kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langsa dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.7
Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

No	Variabel	Nilai Thitung	Nilai Ttabel	Nilai Signifikan	Keterangan
1	Penerapan Akrual Basis	30,844	1,992	0,000	Berpengaruh
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	2,279	1,992	0,020	Berpengaruh
3	Pengendalian Internal Pemerintah	2,602	1,992	0,011	Berpengaruh

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial pada tabel 4.13 di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai signifikan dari penerapan accrual basis adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memiliki nilai THitung lebih besar dari TTabel yaitu 1,992 ($30,844 > 1,992$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan

accrual basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan accrual basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Langsa diterima (H1 diterima).

2. Nilai signifikan dari kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 0,020 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,020 < 0,05$) dan memiliki nilai T_{Hitung} lebih besar dari T_{Tabel} yaitu 1,992 ($2,279 > 1,992$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Langsa diterima (H2 diterima).
3. Nilai signifikan dari Pengendalian Internal Pemerintah adalah sebesar 0,011 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,011 < 0,05$) dan memiliki nilai T_{Hitung} lebih besar dari T_{Tabel} yaitu 1,992 ($2,602 > 1,992$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Langsa diterima (H3 diterima).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang pengaruh Penerapan Accrual basis, Kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota langsa, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Accrual Basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Langsa.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota langsa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Langsa
Kepada pemerintah daerah Kota Langsa supaya lebih mengimplementasikan penerapan Accrual Basis dalam hal keuangan daerah dan Kemampuan tingkat kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan sistem pengendalian internal bukan hanya pada ruang lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tetapi pada seluruh aspek yang ada di Kota langsa. Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya ketiga sistem tersebut akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan khususnya masyarakat di Kota Langsa.
2. Kepada Akademisi

Penelitian ini hanya membahas pengaruh penerapan accrual basis, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut supaya bisa semakin memperkuat hasil penelitian sekarang.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya untuk terus meningkatkan pembahasan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini hanya menggunakan penerapan Accrual Basis, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diharapkan supaya penulis selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Langsa.

Daftar Pustaka

- Asrul. (2022). *Temuan BPK, Pemko Langsa Salah Anggaran Belanja Barang Mencapai Rp 2 Miliar*. *Aceh Journal National Network*. diakses 27 september 2022
- BPK. (2022). *LKPD Kota Langsa (2009-2021)*.
- Brigham, E dan J. F. Houston. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan Ke VIII. Semarang: UNDIP.
- Helle, Vania Annissa, Agustinus Salle, dan Mariolin Sanggenafa. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Inhil)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 14(1):16–35. doi: 10.32520/jak.v11i1.2018.
- Hilmi dan Birra (2022). *Pengaruh Transpartasi, Kompetensi, dan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah*. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*. JAM Vol. 1, No 3
- Irmayani, Ni Wayan Dian (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : CV. Budi utama
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, Yuli, Ronal Aprianto, dan Reni Anggraini. (2019). *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara*. *Jurnal Akuntanika* 5(1):54–61
- Pattiasina, Victor, dan Muhamad Yamin Noch. (2019). *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Ditinjau Dari Sisi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern*. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)* 1(1):18–29.
- Purba, Rahima Br, Haryono Umar, and Silvia Pramana. (2019). *Minimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Peran Dan Fungsi SPIP Di Dinas Pendapatan Kota Medan*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 10(1):172–92.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Sa'adah, Shohabatus, dan Muhammad Nasrullah. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan*. *Journal of Public Accounting (JPA)* 1(1):14–24. doi: 10.30591/jpa.v1i1.2614.
- Simamora, Henry. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Gramedia
- Sinamo, Elisa Febriani, Muhammad Yusra, Hilmi, Naz'aina. (2022). *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mengelola Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*. Vol 1 No 1 2022
- Sinha, M., Arif, S., Ilyas, M., & Hameed, A. (2013). *Student satisfaction and impact of leadership in private universities*. *The TQM Journal*, 25(4), 399-416. doi:10.1108/17542731311314881
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Hastutik, Puji, dan Akhmad Riduwan. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Akuntansi AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Study Pada SKPAD Kota Surabaya)*. *Jurnal Ilmu Dan Riset*
- Sulaiman, Rachmat Luthfi. (2022). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara*. *Jurnal Akuntansi*.
- Ardianto, Rama, dan Chermian Eforis. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Bina Akuntansi* 6(1):95–136. doi: 10.52859/jba.v6i1.44.
- Rahayu, Dhea Putri. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dinas Perikanan Kab. Subang)*. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 01(71):87–96.
- Elfauzi, Adrian Farros, dan Sudarno. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Demak)*. *Diponegoro Journal of Accounting* 8(2):1–9.